

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama ini, pembangunan ekonomi yang tengah dirancang oleh pemerintah merupakan proses yang berkesinambungan dalam bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan umum, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Indikator sosial merupakan suatu bentuk hal penting dalam kemiskinan, hal ini menjadi suatu bentuk proses dalam pembangunan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur telah lama diakui sebagai bentuk faktor terpenting dalam proses pembangunan dalam mendorong pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, baik dalam hal kebijakan maupun ilmu pengetahuan. Para peneliti telah mengeluarkan banyak upaya untuk menilai, seperti bentuk teoritis maupun empiris, peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan perlu dievaluasi. Meskipun literatur yang tersedia tentang topik ini belum bulat, ada konsensus umum bahwa pembangunan infrastruktur kondisinya sudah tepat dalam memainkan peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan dengan demikian berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, khususnya pada negara berkembang. (Humantito, 2009).

Kinerja dalam suatu perekonomian ditingkatkan dengan cara pembentukan lapangan pekerjaan, salah satu yang menjadi tujuan dalam pembangunan nasional di Indonesia yaitu adalah suatu bentuk penataan kehidupan yang layak bagi semua orang nanti pada akhirnya akan mengarah pada kemakmuran. Dampak negatif dari kemiskinan dikatakan mampu mempengaruhi pembangunan ekonomi, oleh karena itu mengurangi jumlah dari penduduk miskin merupakan salah satu bentuk dari sarana pembangunan nasional (Nurwati, 2008). Dengan demikian, hal ini menjadikan kemiskinan sebagai salah satu penyebab utama masalah keterbelakangan di Indonesia.

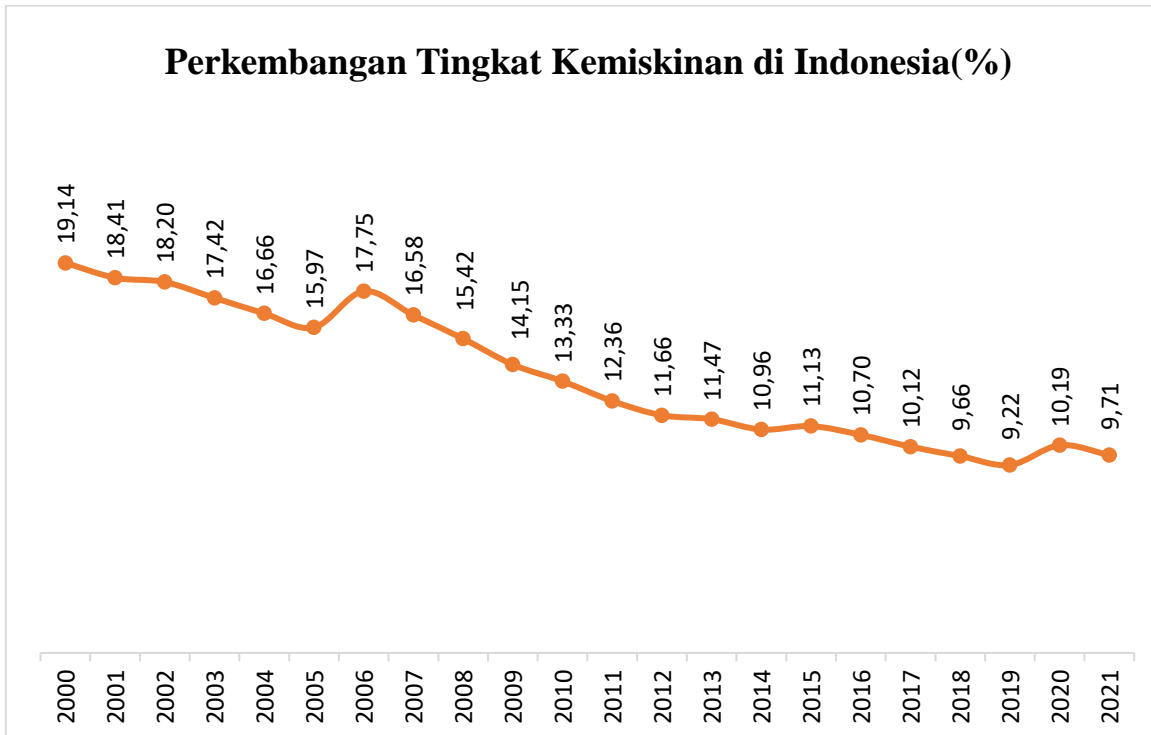
Kemiskinan adalah perkara yang pernah bahkan hingga saat ini masih dialami oleh setiap negara pada belahan bumi manapun. Oleh karena itu, kemiskinan ini sangatlah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan sangat menarik untuk dibahas serta dicarikan solusinya. Karena, problematika kemiskinan ini sangatlah berkaitan dengan

pendidikan dan pengangguran yang sudah menjadi masalah klasik di Indonesia. Masalah kemiskinan ini bahkan sering hadir bersamaan dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini tentu saja memiliki kaitan yang sangat kuat dengan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kualitas pada suatu daerah.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, banyak rencana ataupun kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun sejauh ini belum ada solusi yang dapat menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Menurut (Yacoub 2012), salah satu bentuk masalah mendasar dari kemiskinan sehingga menjadi suatu bentuk masalah global yang selalu dihadapi oleh tiap negara yaitu, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan secara mendasar di kehidupan. Dipaparkan oleh (World Bank, 2004), bahwa terjadinya kemiskinan disebabkan oleh aset atau dikatakan (*lack of income and assets*) serta pendapatan yang kurang dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini diuraikan seperti halnya kebutuhan pangan, papan, sandang, kesehatan, serta tingkat Pendidikan. Terbatasnya kesempatan kerja juga sering dikaitkan dengan kemiskinan, mereka yang tergolong miskin (*the poor*) cenderung menganggur (*unemployed*), serta status dari tingkat pendidikan dan kesehatan mereka umumnya tidak layak dan memadai.

Selama ini, segala bentuk upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bentuk program-program yang cukup inovatif dalam proses pengentasan kemiskinan yang ada. Ada dua strategi yang bisa ditempuh untuk memerangi kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga (orang terdekat) dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhannya di segala bidang. Kedua, memberikan pelatihan khusus kepada mereka agar memiliki kemampuan untuk bekerja, hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan ini berkaitan dengan perwujudan cita-cita bangsa dalam bentuk terciptanya masyarakat adil dan sejahtera (Royat, 2015).

Grafik 1. 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia(%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Data diatas merupakan data yang telah dimuat oleh Badan Pusat Statistik atau (BPS) ditunjukkan oleh Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa persentase dari jumlah penduduk yang berstatus miskin di Indonesia selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir, perkembangannya cenderung berjalan lambat dan adanya lonjakan yang terjadi pada tahun 2006 yang naik sekitar 1,78 persen. Namun seiring berjalannya waktu dalam jangka waktu lima tahun terakhir terlihat adanya penurunan hingga mencapai angka 9,22 persen pada tahun 2019, sebelum akhirnya naik menembus angka 10,19 persen di tahun 2020, lalu kembali mengalami suatu bentuk penurunan sebanyak 0,38 di tahun 2021. Tingkat kemiskinan ini masih relatif tinggi karena menyentuh 9,71 persen atau kurang lebih sebanyak 26,5 juta penduduk di negara ini masih hidup dalam keadaan miskin.

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang kompleks disebabkan oleh banyaknya pengaruh, salah satunya yaitu *lack of income* (kekurangan pendapatan dan harta), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor *non-infrastruktur* seperti kurangnya akses dari layanan public dan fasilitas kesejahteraan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan serta

juga dipengaruhi dengan tingkat PDRB, inflasi, dan jumlah pengangguran yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang menjadi permasalahan di Indonesia, diantaranya yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi, rendahnya indeks pembangunan manusia, serta jumlah pengangguran meningkat.

Salah satu indikator yang dipergunakan dalam melihat adanya suatu bentuk gejala dari pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang pada wilayahnya PDRB dipergunakan secara langsung. Dalam hal ini, PDRB dapat memperlihatkan hal yang telah dicapai pada suatu negara dalam kegiatan perekonomian dengan periode yang ditentukan. Tolak ukur dalam mengukur suatu bentuk kesejahteraan digunakanlah nilai PDRB, hal ini tentunya harus diperhatikan guna untuk melihat besar atau tidaknya tingkat kesejahteraan. Dalam hal ini, seiring meningkatnya PDRB nantinya akan memperlihatkan mengenai meningkatnya pendapatan suatu individu sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi (Wiguna, 2013).

Inflasi sangat memberi pengaruh yang besar dalam mempengaruhi aktivitas dari perekonomian yaitu indikator makro. Semakin tingginya tingkat inflasi, maka kestabilan dari perekonomian tersebut akan terganggu karena mata uang nanti nilainya akan turun dan daya beli masyarakat terpaksa harus ditekan. Pendapatan riil akan diturunkan salah satunya ditekan pada orang yang memiliki pendapatan berskala tetap. Dalam hal inflasi, baik orang yang memiliki pendapatan pun pastinya akan terdampak sebab kenaikan harga dari barang dan jasa. Masyarakat yang berada pada garis kemiskinan juga akan lebih menderita disebabkan oleh harga komoditas naik dan pendapatan mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupan (Oye, 2012).

Hubungan yang sangat erat dalam besarnya pengaruh dari tingkat kemiskinan, dalam hal negara maju maupun berkembang suatu keadaan yang tidak terhindarkan dapat terjadi dalam hal pengangguran. Keterbatasan yang menjadi suatu hal penuh perhatian pada kasus pengangguran yang memberi pengaruh pada kriminalitas, serta kemiskinan (Amalia, 2012).

Pengaruh lainnya yang muncul mengenai tingkat kemiskinan adalah faktor pendidikan. Cara berfikir seseorang tentu berbeda-beda tergantung bagaimana seseorang

tersebut mendapatkan pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang peluangnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera lebih besar. Rata-rata dari lamanya seseorang bersekolah, dapat digunakan untuk mengukur tingkat dari keberhasilan seseorang. RLS atau rata-rata lama sekolah digunakan sebagai indikator pengukuran yang dihitung dari awal masuk sekolah hingga selesai dalam pendidikan formal. Kualitas pendidikan dari suatu wilayah dapat digambarkan dari angka tersebut (Tessa, 2017).

Pemerataan Infrastruktur sudah menjadi idaman bagi setiap negara karena dipandang sebagai salah satu indikator penting dari pembangunan dalam mendorong pertumbuhan dan mengentaskan kemiskinan, hal ini dapat dilaksanakan di dalam bidang kebijakan maupun dalam bidang akademis. Namun indikator lainnya seperti PDRB, inflasi, pengangguran dan pendidikan juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Olufemi dkk. (2013), mengandaikan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur adalah fundamental bagi pertumbuhan ekonomi, selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi belum diterjemahkan ke pembangunan ekonomi mungkin karena infrastruktur yang tidak memadai, sehingga pengangguran dan tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi. Pengentasan kemiskinan dinilai penting sebab jika tidak ditangani dengan segera maka, dampak dari kemiskinan tersebut akan mengenai tingkatan lainnya, seperti kualitas hidup dan kesehatan manusia (Groce, 2011).

Suatu bentuk kemiskinan yang sesungguhnya saat dimana seseorang merasa barang dan jasa diperlukan kurang untuk memenuhi standar kehidupan yang layak (Jhingan, 2000). Dinyatakan juga oleh Arsyad (1997), bahwa adanya kaitan yang begitu erat diantara tingginya tingkat pengangguran serta kemiskinan yang terjadi dalam pandangan masyarakat, definisi orang yang dikatakan sangat miskin ialah mereka yang tidak mempunyai suatu pekerjaan tetap atau hanya bekerja *part-time*. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan kesulitan dalam mencapai standar hidup yang lebih layak. Dalam proses pengentasan kemiskinan, ketersediaan infrastruktur bukan menjadi hal mutlak dalam mengentaskan kemiskinan, namun ada faktor lainnya yang juga dapat berperan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan seperti PDRB, inflasi, pengangguran dan pendidikan.

Di masa saat sekarang ini, kemiskinan di Indonesia pasca pandemi menjadi salah satu fokus pemerintah. Jika kita lihat pada grafik 1.1, tingkat kemiskinan di Indonesia berhasil ditekan oleh pemerintah karena dari data di tahun terakhir pada 2021 berhasil turun menyentuh angka 9,71 persen. Meskipun belum menyamai angka yang didapat sebelum terjadinya pandemi, penurunan jumlah kemiskinan ini tentu saja mengindikasikan bahwa perekonomian di Indonesia sudah berangsur membaik.

1.2. Rumusan Masalah

Didalam proses pengentasan kemiskinan ada kebijakan non-infrastruktur yang juga memiliki hubungan erat terhadap kemiskinan. Salah satu faktornya yaitu PDRB yang didapatkan dari besarnya penghasilan pendapatan oleh kepemilikan penduduk terhadap faktor-faktor produksi yang selama proses produksi turut serta dalam periode tertentu. Hal tersebut membuat PDRB dinilai sebagai suatu hal yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan faktor lain yang dikatakan juga menjadi suatu hal berpengaruh dalam tingkat kemiskinan di suatu daerah. Kemakmuran suatu masyarakat dapat ditentukan melalui tingkat pendapatannya. Namun, pendapatan tersebut dalam suatu kondisi yaitu kesempatan kerja penuh atau *full employment* maka pendapatan tersebut akan bernilai maksimum. Masalah kemiskinan dapat menjadi buruk jika tingkat pengangguran tinggi. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka disusunlah suatu bentuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh dari PDRB terhadap kemiskinan di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?
- d. Bagaimana pengaruh lama sekolah (pendidikan) terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3. Tujuan Umum Penelitian

Jadi berdasarkan rumusan masalah diatas, secara umumnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator non-infrastruktur terhadap